

**MOTIVASI PEMERINTAH INDONESIA MENERAPKAN KEBIJAKAN
KERINGANAN PAJAK TERHADAP INVESTOR ASING
YANG MASUK KE INDONESIA TAHUN 2015**

By: Anastasia Sarah Angela
Anastasia.angela@yahoo.com
Supervisor: **Drs. Syafri Harto M.Si**
Library of Riau University

Department of International Relation
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

This present research describes the motivation of Indonesia Government to implementation of tax allowance policy for foreign investor that will invest in Indonesia in 2015. Global economic crisis and increase of United States economic has impact for economic of Indonesia. In 2014 Indonesia has defisit for trade and moneter transaction.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the motivation of Indonesia Government implementation of tax allowance policy for foreign investor that will invest in Indonesia. The theories applied in this research are merchantilism perspective with the decision making theory by Richad Snyder about internall and externall factors.

The conclusion of the research that motivation of Indonesia Government to implementation of tax allowance policy are to keep economic and politic interest. This was due the defisit of moneter and trade payment, the weakness of Indonesian trades for foreign export, the weakness of trade balance and to support of foreign invesment to use rupiah in trade processing.

Key words: *motivation, implementations policy, tax allowance and investment.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik yang menganalisa mengenai motivasi Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak terhadap investor asing yang masuk ke Indonesia tahun 2015. Salah satu bentuk hubungan internasional dewasa ini adalah

kerjasama internasional antar negara. Kerjasama internasional antar negara ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan dan menguntungkan antara kedua belah pihak. Kepentingan Nasional (*National Interest*) menjadi acuan melakukan kerjasama yang berujung pada Power.

Penanaman modal asing adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan dari luar negeri ke luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi penanaman modal asing yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain: Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.¹

Perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan penanaman modal asing. Penanaman modal asing memegang peranan penting dalam peningkatan devisa suatu negara. Kegiatan perdagangan internasional tidak dapat terlepas dari penanaman modal asing karena memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Sebagai negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.²

Ruang lingkup penelitian yang digunakan untuk memperjelas pemaparan penulis mengenai “Motivasi Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak terhadap investor asing yang masuk ke Indonesia” adalah dimulai dari masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun tidak menutup

kemungkinan penggunaan data–data yang relevan dalam masa–masa yang lain sejauh data tersebut dapat mendukung penelitian.

Penulis menggunakan pendekatan merkantilisme diperkenalkan oleh Jean Boudin dan Thomas Mun. Perspektif Merkantilisme berkembang di Eropa pada abad ke 16 dan 18 yang terjadi pada masa–masa negara Eropa melakukan proses membangun negara bangsa (*nation state*). Pemikiran kaum merkantilisme menyatakan bahwa logam mulia merupakan lambang kekayaan utama bangsa agar dapat menumpukkan kekayaannya yang dapat dimanfaatkan melalui perdagangan internasional.³ Untuk membangun negara bangsa yang kuat untuk memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi sehingga negara harus melibatkan diri secara aktif untuk mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuasaan negara. Oleh sebab itu untuk mempertahankan perekonomiannya supaya tetap kuat maka harus melakukan hubungan ekonomi melalui surplus perdagangan dengan membatasi impor dan menggalakkan ekspor sebanyak-banyaknya. Hubungan dapat disimpulkan bersifat *zero sum game* (konflik bukan bersifat harmonis). Menurut **Thomas Mun** dalam bukunya mengemukakan bahwa:

“The ordinary means therefore to encrease our wealth and treasue is by foreign trade, wherein we must ever observe this rule: to sell more to yearly than we consume of their in value...because that that part of the stock which is not returned to us in wares must

¹ <http://www.jbs.co.id/penanaman-modal-asing-pma-menuperijinan-95.html>. Pada tanggal 5 Maret 2015

² *Ibid.* Hlm 21

³ Mohtar Mas’oed, *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial. 1990. Hlm 26

necessarily brought home ini treasure."⁴

Kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan keringanan pajak terhadap investasi asing di Indonesia merupakan salah satu bentuk peran Pemerintah dalam mengatur perekonomian nasional sebuah negara. Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara-bangsa, dalam hubungan internasional negara sering kali yang menjadi pembuat keputusan yang tentunya tidak bertindak sendiri-sendiri namun berperan sebagai kelompok. Hubungan internasional berdasarkan analisa ini merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Peranan negara sangat penting dalam kerjasama antar negara satu dengan negara lain walaupun oknum yang bekerja dalam melakukan hubungan perdagangan atau terjadinya blok perdagangan adalah kelompok importir maupun eksportir.

Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (*interdependence*) antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran jasa dan komoditi terjadi antara penduduk di satu negara dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan untuk

memperoleh jasa dan komoditi atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat dihasilkan sendiri. Pertukaran teknologi dan modal terjadi dalam rangka membantu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk pengembangan industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh suatu negara belum cukup canggih untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan modal yang dimiliki suatu negara tidak memadai.

Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti. Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional yang digunakan oleh Donald E. Nuchterlain. Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.⁵ Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional yang dirumuskan oleh Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. *Defense Interest*: Kepentingan untuk melindungi Negara atau

⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm 18

⁵ Donald E. Nuchterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57

rakyat dari ancaman fisik dari Negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu Negara.

2. *Economic Interest*: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan Negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan Negara lain akan memberikan keuntungan.
3. *World Order Interest*: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu Negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas Negara dengan aman.
4. *Ideological Interest*: Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu Negara yang berdaulat.⁶

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan keringanan pajak terhadap investor asing tahun 2015 adalah bentuk kepentingan ekonomi Indonesia. Berdasarkan kepentingan ekonomi maka kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan keringanan pajak terhadap investor asing adalah untuk meningkatkan daya tukar mata uang rupiah terhadap keuangan internasional. Selain itu konsep lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tentang kebijaksanaan neraca pembayaran yang merupakan gabungan antara fenomena ekonomi politik internasional dengan studi kebijakan

⁶ *Ibid.*

publik.⁷ Neraca perdagangan adalah berhubungan dengan benda-benda yang diperdagangkan secara internasional baik secara fisik maupun jasa-jasa seperti perkapalan (transportasi), asuransi, komunikasi dan turisme. Neraca perdagangan dan neraca jasa bersama-sama adalah neraca pembayaran. Dalam keadaan normal neraca pembayaran berada pada posisi seimbang.

Dengan keadaan keseimbangan maka dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang cukup lama untuk mempertahankan suatu ekonomi terbuka atas dasar yang berkelanjutan tanpa terjadi pengangguran yang serius. Hal-hal yang terkait secara langsung dengan posisi neraca pembayaran adalah:⁸

1. Waktu atau periode yang cukup lama
2. Sifat dari *the openness of economy*
3. Masalah pengangguran
4. Dasar yang kontinyu dari keseimbangan neraca pembayaran

Suatu negara dengan sistem perekonomian bebas atau terbuka sangat penting membuat keseimbangan neraca pembayarannya. Perubahan dalam neraca pembayaran tidak hanya terjadi karena mekanisme pasar akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor kondisi politik domestik. Hubungan antara keseimbangan neraca pembayaran dengan politik digambarkan dengan suatu redistribusi pendapatan yang menguntungkan golongan kaya akan menaikkan tabungan, mengurangi pendapatan nasional dan akan memulihkan neraca pembayaran dalam arti sempit jika hal itu mengakibatkan perubahan pada

⁷ Charles P kindleberg. 1982. *Ekonomi Internasional II*. Jakarta. Aksara Baru.

⁸ Bhagwati. 1996. *The economic of underdevelopment countries*. New York. Mc graw Hill

bidang politik atau mendistribusi kearah yang berlawanan maka neraca pembayaran tidak bersifat kontinyu. Keseimbangan neraca pembayaran berkaitan erat dengan kapasitas lembaga-lembaga politik dan penyesuaian diri terhadap sistem ekonomi internasional. Penurunan harga pangan dunia dapat menyebabkan likuidasi pada sektor agraris. Menurut Kindleberg, maka kontinuitas dari keseimbangan neraca pembayaran sebuah negara terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu:

1. Keseimbangan melalui waktu
2. Keseimbangan statis
3. Keseimbangan dinamis
4. Sistem ekonomi terbuka, pengangguran dan disequilibrium.

Pada penelitian mengenai motivasi pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak ini, maka dalam manifestasi hubungan internasional, setiap Negara memiliki politik luar negerinya masing-masing. Politik luar negeri tersebut berlandaskan pada kepentingan nasional (*national interest*). Penjelasan ini dapat dilihat dan dipertegas dalam buku Politik Luar Negeri dan Pelaksanaan dewasa ini yang ditulis oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni:

“Politik luar negeri pada hakekatnya adalah alat suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional, kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya, politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang.”⁹

Analisa politik luar negeri diarahkan untuk mengoptimalkan

pencapaian kepentingan nasional dengan dipusatkan pada penelitian kepentingan nasional dan tujuan bangsa, alternative kebijakan yang diambil pemerintah dan juga bangsa biasanya bersifat tetap. Sedangkan Jack C Plano menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain/ politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh sebuah Negara sebagai sebuah inisiatif sebagai reaksi terhadap inisiatif oleh Negara lain”. Teori pembuatan kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh William D. Coplin bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi beberapa factor determinan, antara lain :

1. Situasi politik domestik, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkah laku politik;
2. Situasi ekonomi dan militer domestik, termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan;
3. Konteks internasional, yaitu pengaruh Negara-Negara lain atau konsentrasi politik internasional.
4. Keputusan luar negeri juga bisa dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri (politik, ekonomi, dan militer) dan konteks internasional.

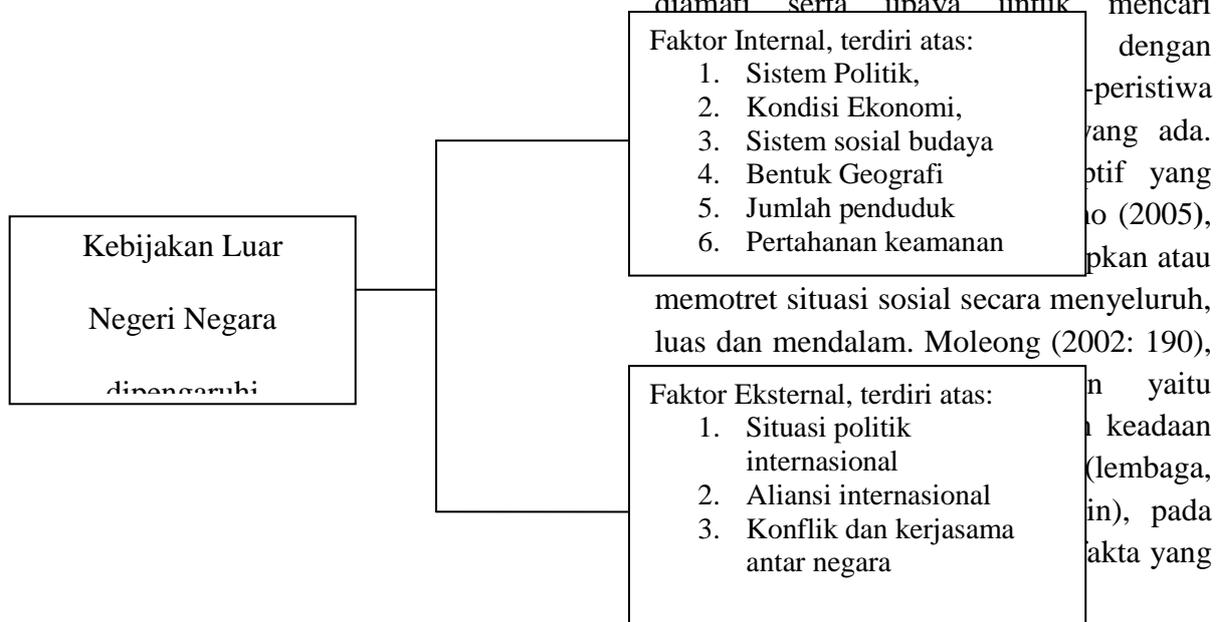
Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan keringanan pajak terhadap investor asing tahun 2015 ini, peneliti menggunakan teori pembuatan kebijakan politik luar negeri yang dikenalkan oleh **Richard Snyder**. Teori **Richard Snyder** membahas

⁹ Mochtar Kusumaatmadja. 1983. *Analisa Politik*. PT Gramedia. Jakarta. Hlm 52

mengenai faktor-faktor yang mendukung kebijakan luar negeri suatu negara. Menurutnya kebijakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang datang dari dalam atau domestik negara itu sendiri seperti keadaan dan situasi lingkungan domestik negara. Baik dibidang politik, ekonomi, budaya, sosial dan pertahanan keamanan.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar negaranya yaitu dari negara-negara lain atau dari dunia internasional, seperti situasi politik internasional, aliansi internasional, konflik internasional.¹⁰

Berikut ini adalah skema dalam penerapan teori Richard Snyder mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara, yaitu sebagai berikut:



Sumber: KJ. Holsti. Politik Internasional Sebagai Suatu kerangka Analisis.

¹⁰ Ricard Snyder. *Foreign Policy Decision Making*. 1962. New York: free Pass. 1962

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan keringanan pajak terhadap investor asing dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah berupa kondisi penurunan nilai mata uang rupiah dan kondisi ekonomi domestik yang semakin melemah. Selain itu, faktor eksternal juga sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan keringanan pajak terhadap investor asing dipengaruhi oleh kondisi ekonomi internasional dimana terjadinya penguatan terhadap nilai mata uang dollar Amerika Serikat sehingga berpengaruh pada nilai tukar mata uang internasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari

Faktor Internal, terdiri atas: dengan
1. Sistem Politik, peristiwa
2. Kondisi Ekonomi, yang ada.
3. Sistem sosial budaya ptif yang
4. Bentuk Geografi to (2005),
5. Jumlah penduduk pkan atau
6. Pertahanan keamanan

memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Moleong (2002: 190),

Faktor Eksternal, terdiri atas: n yaitu
1. Situasi politik a keadaan
internasional (lembaga,
2. Aliansi internasional in), pada
3. Konflik dan kerjasama akta yang
antar negara

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian *library research*. Teknik pengumpulan data dari literatur berupa buku-buku, majalah-majalah surat kabar

dan kunjungan ke situs internet serta sumber lain yang menunjang penelitian. Dokumentasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berakaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”. Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapi perekonomian Indonesia pada beberapa tantangan yang tidak ringan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Tantangan tersebut cukup mengemuka terutama pada awal tahun 2009, akibat masih kuatnya dampak krisis perekonomian global yang mencapai puncaknya pada triwulan terakhir tahun 2008. Ketidakpastian yang terkait dengan sampai seberapa dalam kontraksi global dan sampai seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, bukan saja menyebabkan tingginya risiko di sektor keuangan, tetapi juga berdampak negatif pada kegiatan ekonomi di sektor riil domestik. Kondisi ini mengakibatkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada triwulan I 2009 masih mengalami tekanan berat, sementara pertumbuhan ekonomi masih dalam tren menurun akibat kontraksi ekspor barang dan jasa yang cukup dalam. Perkembangan yang kurang

menguntungkan pada gilirannya telah menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi di sektor keuangan dan sektor riil, serta berisiko menurunkan berbagai capaian positif beberapa tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 26,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS), setara dengan 2,95% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dari defisit (yang direvisi) sebesar 29,1 miliar dollar AS (3,18% dari PDB) di 2013. Bank sentral Indonesia (Bank Indonesia) memprediksi bahwa defisit transaksi berjalan akan berkisar antara 2,8% sampai 3,0% dari PDB pada tahun 2015.¹¹ Pemerintah bertekad untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan dengan cara mendorong ekspor sambil membatasi impor menjelang pengetatan moneter Amerika Serikat lebih lanjut (suku bunga AS yang lebih tinggi) dalam usaha mengurangi *capital outflow* dan mendukung rupiah yang telah melemah tajam terhadap dollar AS sejak pertengahan 2013 waktu Federal Reserve mulai berspekulasi tentang mengakhiri program *quantitative easing*.

Faktor-faktor yang menyebabkan defisit transaksi berjalan Indonesia adalah berakhirnya era boom komoditi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, kurang berkembangnya industri manufaktur berorientasi ekspor, dan impor minyak yang mahal. Di kuartal pertama tahun 2015, ekspor Indonesia menurun 11,7% menjadi 39,1 miliar dollar AS dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya.¹² Mengenai impor minyak yang mahal, Pemerintah Indonesia telah mereformasi kebijakan subsidi bahan bakarnya yang berlimpah pada awal 2015

¹¹ *Ibid.* Hlm 21

¹² <http://www.pma-indonesia.com/>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2015

(yang merupakan reformasi yang relatif mudah karena rendahnya harga minyak mentah dunia), dan seharusnya menyebabkan biaya impor minyak yang lebih rendah. Kendati begitu, ekonom *Standard Chartered Bank* Eric Sugandi mengatakan bahwa insentif pajak tidak akan cukup untuk mendongkrak ekspor karena itu tergantung pada apakah model bisnis perusahaan berorientasi pada ekspor atau pasar domestik. Perusahaan-perusahaan yang berfokus pada pasar domestik tidak akan tiba-tiba mulai mengekspor produk-produk karena adanya keringanan pajak ekspor. Justru, Pemerintah seharusnya berfokus pada infrastruktur dan tanah karena ini adalah isu-isu yang penting bagi para investor.

Sehingga dengan semakin meningkatnya defisit neraca perdagangan luar negeri Indonesia terhadap negara lain, dan penguatan nilai tukar mata uang dollar Amerika Serikat terhadap rupiah. Sehingga pada awal tahun 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan sejumlah paket kebijakan dibidang keuangan dan perpajakan. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah kebijakan insentif fiskal terkait *tax allowance* yang. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu. Sebanyak 16 sektor usaha baru masuk dalam daftar penerima *tax allowance*. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh CNN Indonesia, bahwa kebijakan tersebut telah disepakati oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 6 April 2015 dan efektif berlaku 30 hari setelahnya atau per 6 Mei 2015. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak

Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu sendiri merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011, yang secara otomatis tidak berlaku lagi.¹³

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu ini juga diatur terhadap wajib pajak yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat lagi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pengaturan mengenai wajib pajak dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu Pasal 8, yaitu:¹⁴

1. Atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang telah memperoleh fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan

¹³ <http://www.cnn.news.com>, *Pemerintahan Jokowi tetapkan paket kebijakan menghadapi krisis global*. Diakses pada tanggal 11 Juni 2015

¹⁴ *Ibid.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015.

Pengembangan Ekonomi Terpadu, tidak dapat lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

2. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, tidak dapat lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tata cara Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari Wajib Pajak dan pembahasan pemenuhan kriteria dan persyaratan fasilitas dimaksud diatur dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada saat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu ini mulai berlaku, maka wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk

Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dapat memanfaatkan pemberian fasilitas dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan, sampai dengan berakhirnya pemberian fasilitas dimaksud.

Selanjutnya, terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang pernah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Dalam salinan itu, fasilitas keringanan pajak atau *tax allowance* yang dijanjikan pemerintah masih sama, yakni berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi yang dibebankan selama enam tahun atau masing-masing 5 persen per tahun serta penyusutan dan amortisasi yang dipercepat dan pengenaan PPh atas deviden yang

dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10 persen. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Jumlah bidang usaha penerima fasilitas tax allowance ditambah, dari 52 sektor usaha menjadi 66 sektor usaha. Pada Mei 2015 Pemerintah Indonesia akan menawarkan keringanan pajak pada perusahaan-perusahaan yang mengekspor minimal 30% dari produksi mereka. Pada awal bulan Mei, Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani sebuah paket kebijakan yang mencakup keringanan pajak untuk para eksportir dan juga keringanan pajak untuk perusahaan-perusahaan multinational yang bersedia mereinvestasi keuntungan di Indonesia daripada mengirimkan keuntungan dan dividen kepada para pemegang saham di luar negeri. Paket ini didesain untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia (dan neraca transaksi berjalan).¹⁵

Alasan-alasan kebijakan keringanan pajak ini dilihat dari sisi kepentingan ekonomi dan kepentingan politik Pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Secara teori menurut Richard Snyder, maka kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu alasan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak bagi investor asing yang masuk ke Indonesia tentu saja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini merupakan internal Indonesia, yaitu sebagai berikut:

I. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mendorong Pemerintah

Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak bagi investor asing yang masuk ke Indonesia yang dilihat dari kondisi domestik Indonesia, seperti kondisi atau situasi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Faktor internal yang mendorong Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak bagi investor asing yang masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan Ekonomi Domestik Indonesia

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2014 tidak terlepas dari pengaruh perubahan pola siklus yang mewarnai dinamika ekonomi global. Perubahan pola siklus global tersebut memengaruhi kinerja perekonomian domestik tidak saja melalui jalur perdagangan (*trade channel*), namun juga melalui jalur pasar keuangan (*financial market channel*). Di samping pengaruh global, faktor domestik yang bersifat struktural juga menjadi salah satu akar permasalahan ekonomi. Permasalahan struktural yang semakin mengemuka di tengah stabilitas yang terganggu, bersama-sama dengan tantangan global, menekan kinerja perekonomian domestik. Perubahan siklus global berupa menurunnya permintaan global dan turunnya harga komoditas global menyebabkan pertumbuhan ekspor mencatat kontraksi sehingga memengaruhi kinerja transaksi berjalan, yang telah mengalami defisit sejak triwulan IV-2013. Beberapa bentuk kepentingan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 terjadi Defisit Transaksi Keuangan dan Pembayaran

Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 sanggup mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah kinerja

¹⁵ *Ibid.* Hlm 2

perekonomian global yang melambat. Perekonomian Indonesia tumbuh 6,2% pada tahun 2012, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sepuluh tahun terakhir, yaitu 5,5%. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah, terutama kawasan timur Indonesia. Dari sisi permintaan, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh kuatnya permintaan domestik yang tercermin dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang relatif kuat meskipun menurun pada triwulan terakhir. Di sisi lain, ekspor mengalami tekanan yang berat sebagai dampak perlambatan ekonomi dunia dan penurunan harga komoditas. Sementara impor masih tumbuh cukup tinggi sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Dari sisi produksi, kinerja ekonomi ditopang oleh sektor-sektor yang berhubungan dengan konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara, sektor-sektor yang lebih berorientasi ekspor tumbuh relatif rendah. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Terjaganya stabilitas tersebut tidak terlepas dari peran kebijakan yang ditempuh baik oleh Bank Indonesia maupun pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat juga disertai dengan permintaan terhadap tenaga kerja, tercermin pada tingkat pengangguran yang menurun. Peningkatan tenaga kerja tersebut pada gilirannya berkontribusi pada membaiknya kesejahteraan masyarakat. Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 masih tumbuh cukup baik sebesar 6,2%, meski lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,5%. Belum pulihnya ekonomi negara-negara maju telah memberi dampak rambatan kepada kinerja

perekonomian negara - negara *emerging market* yang melambat pada tahun 2012. Negara yang cukup besar menopang pertumbuhan *emerging market* yaitu Tiongkok dan India tumbuh melambat.¹⁶ Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2012 masih mencatat surplus, akan tetapi mulai tahun 2014 neraca pembayaran Indonesia mengalami tekanan defisit transaksi berjalan. Melemahnya permintaan dari negara-negara mitra dagang dan merosotnya harga komoditas ekspor berdampak pada menurunnya kinerja ekspor. Di sisi lain, impor masih tumbuh cukup tinggi, terutama dalam bentuk barang modal dan bahan baku, sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi. Tingginya impor juga tercatat pada komoditas migas akibat melonjaknya konsumsi BBM, sehingga berdampak pada defisit neraca migas yang terus meningkat dan menambah tekanan pada defisit transaksi berjalan.

Pelemahan neraca pembayaran ini akibatnya, di sepanjang tahun 2014 transaksi berjalan mengalami defisit sekitar 2,7% dari PDB. Pada tahun 2014, inflasi IHK dapat dikendalikan pada level yang rendah dan berada dalam kisaran sasarannya ($4,5\% \pm 1\%$). Inflasi mencapai 4,3% (yoy), didukung oleh terjaganya inflasi inti (4,4%, yoy), terkendalinya inflasi *volatile food* pada level yang rendah (5,7%, yoy) serta rendahnya *inflasi administered prices* (2,7%,yoy).¹⁷

¹⁶ <http://www.kompas.com>. Keringanan Pajak Investasi Padat Karya. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2015

¹⁷ Diakses dari <http://www.iie.com/publications/papers/bergst-en0306-a1.cfm>. *Indonesia Trade Deficits with the United States*. 2006. By Peterson. Institute for

Perkembangan demikian diharapkan membantu mempercepat proses disinflasi yakni menuju sasaran inflasi jangka panjang yang lebih rendah setara dengan tingkat inflasi negara-negara mitra dagang yang rendah. Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah yang dilakukan secara proaktif dan terkoordinasi secara baik di level pusat maupun daerah dapat mengatasi berbagai sumber tekanan inflasi selama 2014.

b. Penurunan Neraca Perdagangan Indonesia terhadap Ekspor Keluar Negeri

Kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapi perekonomian Indonesia pada sejumlah tantangan yang tidak ringan selama tahun 2009-2014. Tantangan itu cukup mengemukakan bahwa pada awal tahun 2009, sebagai akibat masih kuatnya dampak krisis perekonomian global yang mencapai puncaknya pada triwulan IV 2008. Ketidakpastian yang terkait dengan sampai seberapa dalam kontraksi global dan sampai seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, bukan saja menyebabkan tingginya risiko di sektor keuangan, tetapi juga berdampak negatif pada kegiatan ekonomi di sektor riil domestik. Permasalahan struktural juga mewarnai catatan defisit neraca ini, seperti masih terbatasnya jasa transportasi domestik untuk keperluan perdagangan antar negara. Ekonomi global 2013 juga diwarnai ketidakpastian di pasar keuangan global terkait isu pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) di Amerika Serikat. Gejala di pasar keuangan yang terjadi memicu aliran modal asing keluar dari negara emerging market menuju negara maju, terutama Amerika Serikat, sejalan

dengan munculnya ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat.

Melebarnya defisit transaksi berjalan dan menurunnya surplus transaksi modal dan finansial menyebabkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit setelah sebelumnya mengalami surplus. Defisit transaksi berjalan yang semakin melebar tidak terhindarkan mendorong nilai tukar rupiah bergerak dalam tren melemah. Eskalasi pelemahan rupiah semakin kuat terjadi sejak pertengahan Mei 2013 sampai menjelang akhir September 2013, saat terjadi aliran keluar modal asing di pasar keuangan yang meningkat akibat rencana pengurangan stimulus moneter di AS dan persepsi negatif investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Sebagai akibatnya rupiah pada tahun 2013 terdepresiasi cukup tajam dibandingkan tahun 2012, baik secara point to point ataupun secara rata-rata.¹⁸

Proses penyesuaian ekonomi domestik yang tetap terkendali juga ditopang stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga, terutama ketahanan perbankan yang tetap kuat. Ketahanan perbankan yang tetap kuat tercermin pada CAR yang tinggi dan NPL yang rendah. Ketahanan perbankan yang masih kuat tersebut cukup positif di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi yang kemudian berdampak pada pertumbuhan kredit yang melambat pada 2013. Sementara itu, pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun lalu, meskipun terdapat kecenderungan mulai melambat sejak September 2013. Pertumbuhan kredit UMKM yang masih tinggi

International Economics. Pada tanggal 8 November 2009.

¹⁸ *Ibid.* Hlm 11

mengindikasikan besarnya peran UMKM dalam menopang perekonomian domestik di tengah kuatnya pengaruh perlambatan ekonomi global. Di lain pihak, kinerja pasar obligasi dan pasar saham dalam tren menurun dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global dan melambatnya ekonomi domestik.

2. Kepentingan Politik Domestik Indonesia

Selain faktor ekonomi, kondisi politik domestik Indonesia tentu saja juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan keringanan pajak. Kesamaan pemahaman antara Presiden selaku kepala eksekutif dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia selaku legislatif Indonesia yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan semakin mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan keringanan pajak terhadap investor asing yang akan masuk ke Indonesia guna menghadapi kondisi perekonomian internasional yang semakin berubah-ubah. Berikut ini adalah sisi politik dalam implementasi kebijakan keringanan pajak di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum terhadap investor

Perkembangan ekonomi global sejak tahun 2013 diwarnai ketidakpastian di pasar keuangan global terkait isu pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) di Amerika Serikat. Gejolak di pasar keuangan yang terjadi memicu aliran modal asing keluar dari negara *emerging market* menuju negara maju, terutama Amerika Serikat, sejalan dengan munculnya ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Indonesia, yang menjadi salah satu tempat penanaman modal portfolio asing, juga tidak terlepas dari dampak rencana *tapering off* ini,

dimana terjadi aliran modal asing yang keluar cukup signifikan dari pasar keuangan domestik. Oleh karena itu, perkembangan *trend* yang menurun dalam perkembangan perekonomian global dan peningkatan angka pengangguran serta penurunan ekonomi domestik Indonesia pada tahun 2015 mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan keringanan pajak terhadap investor yang akan masuk ke Indonesia sehingga mendorong investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia serta berdampak pada kestabilan ekonomi dan politik di Indonesia.

b. Image Indonesia di mata internasional

Salah satu motivasi Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak terhadap investor asing yang akan masuk ke Indonesia salah satunya adalah untuk menciptakan persepsi dan *image* yang baik bagi Pemerintah Indonesia dimata dunia internasional. Kebijakan keringanan pajak terhadap investor asing yang akan masuk ke Indonesia tahun 2015 merupakan salah satu bentuk pemulihan citra Indonesia dimata dunia internasional. Hal ini dikarenakan sejauh ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi tempat perkembangan terorisme. Selain itu faktor kesulitan pengurusan birokrasi perizinan di Indonesia juga menjadi pemicu Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak terhadap investor asing yang akan masuk ke Indonesia.¹⁹ Oleh karena itu dengan adanya kebijakan keringanan pajak terhadap investor asing yang akan masuk ke Indonesia oleh

¹⁹ *Ibid.*

Pemerintah Indonesia tahun 2015 ini diharapkan menjadi salah satu sarana diplomasi oleh pemerintahan Indonesia untuk mengubah citra Indonesia di dunia internasional. Sehingga mampu memberikan keterbukaan bagi negara lain untuk melakukan kerjasama dengan negara Indonesia.

II. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, maka faktor eksternal juga berpengaruh dalam motivasi pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak terhadap investor yang akan masuk ke Indonesia. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mendorong Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak bagi investor asing yang masuk ke Indonesia yang dilihat dari kondisi ekonomi dan politik internasional. Faktor eksternal yang mendorong Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak bagi investor asing yang masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Perdagangan dan Keuangan Internasional

Pasca perang, sistem keuangan internasional kacau, masing-masing negara berlomba-lomba mencetak uang untuk membiayai pembangunan kembali negaranya tanpa diback up dengan kecukupan cadangan emas. Hiper inflasi terjadi singkat kata, negara Eropa tengah terperangkap dalam resesi. Amerika Serikat dan Inggris melakukan inisiatif dalam berbagai pertemuan internasional, kedua negara pemenang perang ini saling berebut untuk memenangkan kepentingannya dalam perjanjian ini. Akhirnya perjanjian Bretton Woods pun ditanda tangani oleh 44 negara. Dua butir kesepakatan yang sangat penting adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya IMF.
2. USD dan Poundsterling disepakati sebagai cadangan devisa dari negara penandatangan perjanjian.

Keberhasilan yang dibuat oleh para leluhur Amerika Serikat inilah, khususnya butir kedua, merupakan penyumbang terbesar dalam kejayaan Amerika Serikat sampai saat ini, dan saat itu jugalah lingkaran “USD currency traps” dimulai. Semenjak disahkannya perjanjian Bretton Woods, konsep mata uang berbasis emas kemudian disingkirkan dan diganti dengan fiat money atau sistem uang berbasis kertas. Pada saat itu emas dengan berat 28,35 gram dihargai sama dengan 35 dolar Amerika Serikat. Sistem uang kertas inilah salah satu faktor yang menyebabkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalis. Uang kertas memiliki kelemahan yang sangat mendasar yaitu selalu terkena inflasi permanen. Kondisi perdagangan dan keuangan internasional saat ini tidak lagi bersifat monopoli perdagangan oleh Amerika Serikat. Saat ini Tiongkok pun menjadi salah satu negara yang menentukan arah perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini terjadi dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat. Untuk mengatasi kekurangan likuiditas di pasar modal, bank sentral negara-negara maju yang bursanya terkait dengan industri subprime mortgage menggelontorkan dana ke pasar uang (*open market operations*) dengan memasuki transaksi Repo (*Repurchase Agreement*). Ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar mereka dan menumbuhkan sentimen positif akan bursanya. Dengan diturunkannya suku bunga, maka akan ada kelonggaran bagi peminjam subprime mortgage untuk melunasi utangnya kepada pemberi pinjaman. Itu juga berarti, surat utang berbasis subprime mortgage yang

kini banyak dipegang investor seluruh dunia kembali memperoleh jaminannya dan kembali bernilai. Inilah yang menyebabkan pelaku pasar menarik investasinya, baik yang berupa saham maupun valas dari negara-negara berkembang. Dengan diturunkannya suku bunga The Fed, maka Indeks Dow Jones kembali stabil dan pasar mulai tenang. Selain itu, langkah ini pun diikuti intervensi dari pemerintah-pemerintah negara seluruh dunia.

2. Krisis Keuangan Internasional

Pada tahun 2008, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat ini menghenyakkan banyak pihak. Banyak yang terkejut mengapa negara sebesar Amerika Serikat bisa mengalami krisis ekonomi atau moneter yang merontokan pasar saham dan keuangan di Amerika Serikat dan Bahkan di dunia internasional. Pada tahun 2001-2005, pertumbuhan perumahan di Amerika Serikat menggelembung seiring rendahnya suku bunga perbankan akibat tumbangannya industri dotcom. Sejak 1995, industri dotcom (saham-saham teknologi) di Amerika Serikat lebih dahulu *booming*,²⁰ namun akhirnya mengalami kebangkrutan dan menyebabkan banyak perusahaan jenis ini tak mampu membayar pinjaman ke bank. Untuk menyelamatkan perusahaan tersebut, The Fed menurunkan suku bunga, sehingga suku bunga menjadi rendah. Suku bunga yang rendah dimanfaatkan pengembang dan perusahaan pembiayaan perumahan untuk membangun perumahan murah dan menjualnya melalui skema *subprime mortgage*.²¹ Gelembung

²⁰ Diakses dari <http://www.MemahamiKrisisEkonomiAmerika&AkarPenyebabnya.com>. Oleh Amran nasution. Pada tanggal 10 Januari 2011

²¹ *Ibid.* Hlm 2

perumahan ini terjadi di banyak negara bagian, seperti California, Florida, New York, dan banyak negara bagian di barat daya. RealtyTrac mencatat pengumuman lelang sebanyak 179.599 yang mencakup 2,5 juta rumah yang dinyatakan disita karena gagal bayar. Ini adalah jumlah penyitaan terbanyak selama 37 tahun.²² Penyitaan besar-besaran ini jelas dapat menimbulkan banyak warga Amerika Serikat menjadi tuna wisma mendadak, dan bisa menjadi masalah sosial baru serta bisa menambahkan tingkat angka kriminalitas. Inilah asal mula terjadinya krisis subprime mortgage yang berimbas ke seluruh dunia. BBC menyebutkan aktor-aktor yang berperan dalam krisis ini antara lain adalah sebagai berikut, yaitu:²³ Dampak subprime mortgage Amerika Serikat di Indonesia memang sebesar dampaknya pada negara-negara lain, karena adanya peraturan BI yang tidak memungkinkan perbankan membeli surat utang berperingkat rendah. Namun, sebenarnya dampak krisis finansial ini masih tersisa di dunia. Pada 3 Maret 2008, telah dijelaskan bahwa pasar saham Asia jatuh setelah UBS AG memprediksikan bahwa perusahaan keuangan global kemungkinan akan kehilangan sekitar US\$ 600 miliar karena kredit macet hipotek perumahan subprime mortgage di Amerika Serikat. Westpac Banking Corp. merugi 3,3% sedangkan Macquarie Group Ltd.²⁴ Pemasukan uang dalam perdagangan Amerika Serikat menurun 4,7 persen dari penutupan saham di Tokyo 29 Februari 2008, dimana Sony Corp. rugi 3,6 persen,

²² Diakses dari <http://www.motivatorindonesia.com>. *Krisis Ekoonomi Amerika.Mengapa?.* pada tanggal 2 Januari 2011

²⁴ Diakses dari <http://www.kompas.com>. *krisis ekonomi Amerika serikat 2008.* Oleh Meta Tenggara. Pada tanggal 5 juni 2010

setelah Yen menguat terhadap dolar, sehingga mengurangi pendapatan di luar negeri.²⁵ Index Australia anjlok S&P/ASX 200 hingga 2,9 persen menjadi 5,410.90 pada pukul 10.12 di Sydney. Index New Zealand's NZX 50, yang menjadi patokan Asia untuk memulai perdagangan, turun 1,1 persen menjadi 3,542.16 di Wellington.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi Pemerintah Indonesia menetapkan keringanan pajak terhadap investor asing yang masuk ke Indonesia tahun 2015 dikarenakan adanya faktor internal dan faktor eksternal dari Indonesia sendiri. Faktor internal dari domestik Indonesia dikarenakan kondisi ekonomi dan politik domestik Indonesia. Kepentingan ekonomi Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keringanan pajak terhadap investor asing yang masuk ke Indonesia dikarenakan adanya defisit transaksi keuangan dan pembayaran Indonesia berupa pelemahan neraca pembayaran ini akibatnya, di sepanjang tahun 2014 transaksi berjalan mengalami defisit sekitar 2,7% dari PDB. Pada tahun 2014, inflasi IHK dapat dikendalikan pada level yang rendah dan berada dalam kisaran sasarannya (4,5% ± 1%). Inflasi mencapai 4,3% (yoy), didukung oleh terjaganya inflasi inti (4,4%, yoy), terkendalinya inflasi *volatile food* pada level yang rendah (5,7%, yoy) serta rendahnya *inflasi administered prices* (2,7%, yoy).²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Diakses dari <http://www.iie.com/publications/papers/bergst-en0306-a1.cfm>. *Indonesia Trade Deficits with the United States*. 2006. By Peterson. Institute for

Selain itu, kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapkan perekonomian Indonesia pada sejumlah tantangan yang tidak ringan selama tahun 2009-2014 mengakibatkan terjadinya penurunan neraca perdagangan Indonesia terhadap ekspor keluar negeri. Selain itu, faktor eksternal yang berpengaruh dalam kebijakan keringanan pajak ini adalah kondisi krisis keuangan internasional terutama krisis yang terjadi di Amerika Serikat yang mengakibatkan seluruh negara didunia merasakan dampak krisis tersebut. Oleh karena itu dengan kondisi pelemahan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi domestik Indonesia, sehingga mengakibatkan Pemerintah Republik Indonesia melakukan pengesahan terhadap kebijakan keringanan pajak pada tahun 2015 oleh Pemerintah Indonesia ini dilakukan dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu. Selain itu terobosan kebijakan lainnya adalah dengan memberikan kebebasan visa bagi 41 negara mitra investasi Indonesia dengan tujuan untuk membuat investor menggunakan mata uang rupiah dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Mohtar Mas' oed, *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial. 1990.

Internatiional Economics. Pada tanggal 8 November 2009.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Donald E. Nucterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979,

Charles P kindleberg. 1982. *Ekonomi Internasional II*. Jakarta. Aksara Baru.

Bhagwati. 1996. *The economic of underdevelopment countries*. New York. Mc graw Hill

Mochtar Kusumaatmadja. 1983. *Analisa Politik*. PT Gramedia. Jakarta.

Ricard Snyder. *Foreign Policy Decision Making*. 1962. New York: free Pass. 1962

Website

Diakses dari.[http://www.MemahamiKrisisEkonomiAmerika & Akar Penyebabnya.com](http://www.MemahamiKrisisEkonomiAmerika&AkarPenyebabnya.com). Oleh Amran nasution. Pada tanggal 10 Januari 2011

Diakses dari.<http://www.kompas.com.krisisekonomiAmerikaserikat2008>. Oleh Meta Tenggara. Pada tanggal 5 juni 2010

Diakses dari.<http://www.motivatorindonesia.com>.

com. *Krisis Ekonomi Amerika.Mengapa?*. pada tanggal 2 Januari 2011

Diakses dari.<http://www.iie.com/publications/papers/bergsten0306-a1.cfm>. *Indonesia Trade Defisits with the United States*. 2006. By Peterson. Institute for Internatiional Economics. Pada tanggal 8 November 2009.

Diakses dari.<http://www.iie.com/publications/papers/bergsten0306-a1.cfm>. *Indonesia Trade Defisits with the United States*. 2006. By Peterson. Institute for Internatiional Economics. Pada tanggal 8 November 2009.

<http://www.cnn.news.com>,*Pemerintahan Jokowi tetapkan paket kebijakan menghadapi krisis global*. Diakses pada tanggal 11 Juni 2015

<http://www.kompas.com>.*Keringanan Pajak Investasi Padat Karya*. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2015

<http://www.jbs.co.id/penanaman-modal-asing-pma-menuperijinan-95.html>. Pada tanggal 5 Maret 2015

<http://www.pma-indonesia.com/>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2015